Sistem atau Ajaran Beban Pembuktian dalam Acara Pengadilan Tata Usaha Negara

Nama : SUWARDI IDRIS

Email : adychanbers@gmail.com

No BP : 2010003600076

Universitas Ekasakti

A. PENDAHULUAN

Negara adalah suatu organisasi kekuasaan dari pada masyarakat dan merupakan alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan negara, diantaranya menyelenggarakan ketertiban hukum. Penyelenggara negara hendaknya menciptakan suatu kondisi yang mengarah pada tujuan agar warga masyarakat dapat merasakan dan menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan. Dalam pelaksanaannya sering sekali timbul benturan kepentingan, perselisihan dan sengketa. Salah satunya antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat yang merugikan atau menghambat jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Sengketa tersebut diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara harus mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum sehingga dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat.

Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang wewenangnya adalah memeriksa untuk melindungi dan mengembangkan serta memelihara administrasi negara yang tepat menurut hukum atau tepat menurut undang-undang atau tepat secara efektif maupun berfungsi secara efisien. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara

antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat bidang tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian keputusan PTUN merupakan dasar lahirnya sengketa Tata Usaha Negara, sedangkan dalam Pasal 1 ayat (3) dirumuskan bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Dengan adanya akibat hukum yang ditimbulkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut terhadap seseorang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan agar keputusan Tata Usaha Negara yang berwenang, gugatan berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi rehabilitasi.

Pada dasarnya yang menjadi dasar gugatan adalah :

- Apakah keputusan itu bertentangan dengan undang-undang;
- Wewenang yang digunakan oleh Pejabat Tata Usaha Negara;
- Menyangkut kepentingan dari para pihak.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah proses pembuktian di persidangan dalam sengketa Tata Usaha Negara yang menyangkut alat bukti, serta beban pembuktian dan penilaian atas alat bukti yang dijalankan dalam Peradilan Tata Usaha Negara.

B. PEMBAHASAN

Landasan Teori

Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

Pasal 1 angka (3) menyebutkan bahwa keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Pasal 1 angka (4) menyebutkan bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi relatif Peradilan Tata Usaha Negara adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan daerah hukumnya.

Pengertian Gugatan, Penggugat dan Tergugat dalam Peradilan Tata Usaha Negara

Menurut Pasal 1 angka (5) gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara agar suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap tidak sah atau batal, yang diajukan ke pengadilan Tata Usaha Negara untuk mendapat putusan. (mengenai gugatan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c).

Penggugat dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan atas dikeluarkannya suatu keputusan Tata Usaha Negara. Mengenai terduga diatur dalam Pasal 1 angka (6) yang menyatakan terduga adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a, b dan c dijelaskan mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan. Alasan tersebut merupakan dasar-dasar(kriteria) atau ukuran untuk menguji (toetsingsgronden) bagi hakim Tata Usaha Negara pada waktu menilai apakah keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu bersifat melawan hukum atau tidak.

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan mengira memiliki suatu wewenang untuk mengeluarkan atau menolak mengeluarkan suatu keputusan. Padahal ia tidak berwenang untuk berbuat demikian. Jadi memang hakim perlu untuk meneliti peraturan yang menjadi dasar keputusan yang disengketakan.

Undang- Undang menentukan tentang luas pembuktian yang ada dalam Pasal 107 menyatakan: Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan (luas pembuktian), beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Dalam proses pembuktian itu dimulai dengan menentukan tentang luas pembuktian. Artinya hakim mula- mula menentukan fakta-fakta apa yang relevan bagi keputusan akhir nanti. Sesudah hakim meneliti menurut keyakinannya fakta-fakta mana yang dianggapnya sudah cukup pasti. Kemudian ia melihat fakta-fakta mana saja yang masih perlu dibuktikan. Ini semua yang dimaksud luas pembuktian. Dapat diperkirakan dalam praktek nanti fakta-fakta itu mula-mula diajukan dalam proses persidangan oleh para pihak.

Pembagian beban pembuktian itu merupakan persoalan yang sulit. Yang dimaksud dengan beban pembuktian adalah kewajiban yang dibebankan kepada kepada satu pihak untuk membuktikan suatu fakta dimuka hakim yang sedang memeriksa perkara tersebut. Dalam hal ini hakimlah yang menetapkan sekalipun sudah tentu para pihak juga dapat mengajukan usul-usulnya dan menawarkan diri untuk membuktikan hal-hal yang dapat mempengaruhi putusan akhir kelak. Namun hakimlah yang melakukan pembagian beban pembuktian itu menurut

kriteria tertentu. Kewajiban untuk membuktikan itu tidak ada pada para pihak, tetapi barang siapa diberi beban membuktikan sesuatu dan ia tidak melakukannya akan menanggung resiko, bahwa beberapa fakta yang mendukung posisinya akan dikesampingkan dan dianggap tidak terbukti. Jadi beban pembuktian itu mengandung resiko pembuktian.

Dalam Pasal 100 disebutkan alat bukti yang digunakan dalam PeradilanTata Usaha Negara, yaitu:

1. Surat atau tulisan sebagai bukti terdiri dari: Akta otentik, Akta di bawah tangan dan Surat-surat bukan akta.
2. Keterangan ahli yaitu pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya.
3. Keterangan saksi dianggap sebagaialat bukti apabila keterangan ituberkenaan dengan hal yang dialami, dilihat dan didengar oleh saksi sendiri.
4. Pengakuan para pihak yangbersengketa.
5. Pengetahuan hakim adalah sesuatu yang oleh hakim diketahui dan diyakini kebenarannya.
6. Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan.

Penilaian Atas Alat Bukti

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dalam Pasal 107 membatasi kebebasan hakim dalam menilai suatu hasil pembuktian dengan ketentuan, bahwa untuk sahnya pembuktian itu diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti (tentunya telah disebutkan dalam Pasal 100) berdasarkan keyakinan hakim. Karena masing-masing alat bukti yang tersebut dalam Pasal 100 tersebut sama derajat bobotnya, maka yang dimaksud dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti tersebut yaitu berupa alat bukti yang tersebut dalam Pasal tersebut. Sekalipun ada dua alat bukti yang diajukan, hal itu tidak berarti bahwa hakim harus menganggap fakta yang

dibuktikan dengan dua alat bukti telah sah terbukti. Untuk sahnya pembuktian masih diperlukan adanya keyakinan hakim bahwa fakta yang dibuktikan dengan dua alat bukti tersebut benar adanya.

Jadi, sebenarnya walaupun ada batasnya tentang jumlah alat bukti bahwa harus ada dua alat bukti dan macamnya alat bukti yaitu hanya alat-alat bukti yang tersebut di dalam Pasal 100 saja yang dapat diberikan suatu nilai pembuktian. Namun karena semua itu digantungkan kepada adanya keyakinan hakim, maka sebenarnya hakim juga memiliki suatu ruang kebebasan cukup besar pada waktu ia memberikan nilai pembuktian pada alat-alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan.

Teori-Teori Pembagian Beban Pembuktian

A. Teori Beban Pembuktian Afirmatif.

Teori ini sesuai dengan adagium “*Ei Probtio qui dicit negat*” artinya beban pembuktian itu dibebankan kepada pihak yang mendalilkan sesuatu, bukan yang mengingkari sesuatu, sekalipun bahwa sesuatu yang negatif seperti yang di dalilkan itu dalam keadaan-keadaan tertentu bukan suatu hak yang bisaterjadi.

B. Teori Hukum Subyektif.

Teori ini lahir dari teori beban pembuktian afirmatif dan berpangkal pada dalil bahwa beban pembuktian itu seharusnya diletakkan pada pihak yang meminta kepada hakim agar hak subyektif yang didalilkannya diakui. Jadi siapa berdasarkan suatu hak subyektif menuntut sesuatu dan hal itu disangkal oleh pihak lawannya, maka yang menuntut sesuatu tersebut harus membuktikan fakta-fakta yang melahirkan hak subyektifnya tersebut. Teori ini sulit untuk diterapkan dalam praktek, karena pengertian hak subyektif itu sulit rumusannya. Lagi pula teori ini dapat menimbulkan hal-hal yang tidak adil apabila pihak-pihak penggugatan itu lalu

dibebaskan sama sekali mengenai pembuktian tentang terdapatnya fakta-fakta yang bersifat mengganggu atau membatalkan hukum tersebut.

C. Teori Hukum Obyektif.

Beban pembuktian tentang fakta-fakta yang dapat disimpulkan dari hukum obyektif (yang termuat dalam peraturan-peraturan, pengecualian-kecualian, peraturan-peraturan pokok maupun peraturan –peraturan tambahan) yang mempunyai akibat hukum secara positif maupun negatif itu ada pada para pihak. Menurut teori ini setiap kali hakim harus meneliti dalam peraturan hukum material yang diterapkan unsur-unsur apa saja yang harus ada agar dapat menimbulkan akibat hukum seperti yang didalilkan oleh penggugat.

D. Teori Keadilan.

Teori ini akan memberikan jawaban umum atas pertanyaan: bagaimana harus melakukan pembagian beban pembuktian? Jadi setiap kali akan melakukan pembagian beban pembuktian, hakim memperhatikan keadaan-keadaan yang ada secara konkret dalam pemeriksaan dan atas dasar keadaan-keadaan yang nyata itu ia melakukan pembagian beban pembuktian. Beban pembuktian mengenai suatu fakta akan diletakkan pada pihak yang paling sedikit dibebatkan oleh pembebanan pembuktian tersebut. Kelemahan teori ini berupa ketidakpastian bagi para pihak untuk menyiapkan diri tentang apa saja yang harus dibuktikan dalam proses dan juga bagi hakim sendiri teori ini tidak memberikan suatu pedoman, karena keadilan itu merupakan pengertian yang samar.

Salah satu hal yang paling penting yang harus dilakukan hakim dalam pemeriksaan sengketa tata usaha negara adalah pembuktian. Mengenai luas pembuktian Undang-Undang hanya menentukan dalam Pasal 107, bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan (luas pembuktian), beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim.

Pada Peradilan Tata Usaha Negara, model pembuktiannya yakni kebenaran formil mengacu pada objek sengketa, yakni putusan pejabat yang merugikan para pihak, dan memperhatikan kebenaran materiil, yakni memotret dan memperhatikan proses terjadinya, atau timbulnya objek gugatan tata usaha negara itu. Dalam proses pembuktian itu dimulai dengan menentukan tentang luaspembuktian. Artinya hakim mula- mulamenentukan fakta- fakta apa yang relevan bagi keputusan akhir nanti. Sesudahhakim meneliti menurut keyakinannya fakta-fakta mana yang dianggapnya sudah cukup pasti. Kemudian ia melihat fakta- fakta mana saja yang masih perlu dibuktikan. Ini semua yang dimaksud luas pembuktian. Dapat diperkirakan dalam praktek nanti fakta-fakta itu mula-mula diajukan dalam proses persidangan oleh para pihak.

Hukum acara tata usaha negara menetapkan tiga aspek yang berkaitan dengan proses pembuktian, yaitu: alat bukti, beban pembuktian dan penilaian atas alat bukti. Aspek-aspek inilah yang mendukung proses pembuktian yang dijalankan di persidangan sengketa TUN.

Beban Pembuktian

Pembagian beban pembuktian dalam proses Peradilan Tata Usaha Negara ini dapat diterapkan beberapa pangkal tolak sebagai berikut: Pengumpulan bahan-bahanpembuktian itu dilakukan baik oleh pihak-pihak maupun pengadilan sendiri.

Para pihak itu memang berwenang untuk membuktikan sesuatu, namun ia tidak otomatis wajib membuktikan dalil- dalilnya. Mereka dapat menyerahkan dokumen-dokumen, membawa saksi-saksi sendiri untuk didengar. Hakim seharusnya meluluskan usaha pembuktian mereka itu, kecuali kalau demi kepentingan tertib beracara tidak mengijinkannya atau kalau hal itu tidak ada manfaatnya untuk menjamin perkaranya.

Pengadilan dapat membebaskan pembuktian seluruhnya atau sebagian kepada para pihak dan sebagian lagi dapat ia cadangkan untuk dicari kebenarannya oleh pengadilan sendiri. Pengadilan dapat meminta keterangan- keterangan lebih lanjut mengenai suatu hal yang belum

jelas. Dalam tingkat pemeriksaan persiapanpun hakim sudah dapat memerintahkan untuk memanggil pihak-pihak, saksi-saksi atau saksi ahli untuk diminta keterangan- keterangan yang diperlukan. Apabila hakim berpendapat bahwa pembuktian mengenai sesuatu itu tidak akan dilakukan sendiri, maka hal itu dapat ia bebaskan kepada para pihak.

Cara pembebanan pembuktian kepada para pihak itu oleh hakim perlu dalam bentuk putusan sela (*interlocutoir*) pembebanan pembuktian itu dapat dilihat pada pertanyaan-pertanyaan hakim untuk memperoleh keterangan-keterangan lebih lanjut mengenai suatu hal. Apabila hal itu ia lakukan semasa waktu persiapan pemeriksaan (sebelum pemeriksaan dimuka sidang umum), maka para pihak dapat mempersiapkan diri dalam usaha pembuktian yang akan ia lakukan.

Mengenai cara pembagian beban pembuktian dalam prakteknya nanti hal itu diserahkan pada hakim yang bersangkutan. Dengan melihat situasi perkaranya dialah yang dapat menentukan bagaimana adilnya dan bagaimana penanganannya. Undang-undang tidak mengatur tentang pembagian beban pembuktian. Namun pada dasarnya pembagian beban pembuktian itu diberikan kepada hakim untuk menentukan kepada siapa beban pembuktian itu akan ia bebaskan, yang pada dasarnya dalam hukum Peradilan Tata Usaha Negara itu beban pembuktian biasanya dibebankan kepada kedua belah pihak, karena dalam hukum Peratun ini setiap pihak akan mempunyai kewajiban untuk membuktikan suatu hal yang ia dalilkan pada saat pemeriksaan dipersidangan.

Beban pembuktian ini berupa kewajiban dari para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang dapat ia ajukan dipersidangan untuk membuktikan suatu fakta dimuka hakim. Beban pembuktian yang dibebankan kepada pihak penggugat biasanya berkaitan dengan hal-hal yang tertuang dalam surat gugatannya, artinya seorang penggugat wajib membuktikan

alasan- alasan yang ada dalam surat gugatannya dengan cara menghadirkan alat bukti yang dibutuhkan berkaitan dengan alasan-alasan gugatan tersebut.

C. PENUTUP

Proses pembuktian di persidangan dalam sengketa PTUN berpegangan pada ketentuan Pasal 107 yang menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Peradilan Tata Usaha Negara telah menetapkan alat-alat bukti yaitu: surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, pengetahuan hakim dan keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan. Semua alat bukti memiliki nilai atau bobot pembuktian yang berbeda ketika diajukan dalam persidangan mengenai pembagian beban pembuktian yang pada pelaksanaannya setiap pihak mempunyai beban pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan, dengan menghadirkan alat-alat bukti ataupun fakta-fakta yang berkaitan dengan hal yang dibebankan untuk dibuktikan. Sedangkan penilaian atas alat bukti berkaitan dengan penilaian atas hasil pembuktian secara keseluruhan dimana seorang hakim mempunyai kebebasan menilai alat bukti yang diajukan dengan berpegang bahwa alat bukti tersebut yang memberikan petunjuk terhadap penyelesaian sengketa, sehingga hakim pada saat melakukan penilaian hasil suatu pembuktian tidak hanya semata-mata berdasarkan pada keyakinannya tapi didukung bukti lainnya.

Diharapkan selama proses pemeriksaan berlangsung bagi para pihak maupun kuasa hukumnya dapat hadir di persidangan dan memberikan bukti-bukti yang dibutuhkan oleh hakim guna penyelesaian sengketa, karena dalam undang-undang Peratun telah ditetapkan macam-macam alat bukti yang berkaitan dengan sengketa TUN. Sebaiknya dalam hal pembagian beban pembuktian, hakimlah yang harus menetapkannya, karena hakim yang menentukan jalannya sidang namun terhadap para pihak yang diberi beban pembuktian ini

kirannya dapat melaksanakannya dengan mengemukakan fakta-fakta dan alat-alat bukti yang berkaitan dengan hal-hal yang didalilkan oleh para pihak tersebut. Karena suatu pihak yang mendalilkan atau mempunyai kepentingan harus dapat membuktikannya. Hal ini guna memberikan petunjuk agar hakim mengetahui hal-hal yang harus dibuktikan baik oleh pihak penggugat dan pihak tergugat. Hendaknya juga hakim pada waktu menilai alat bukti selama proses pembuktian kiranya dapat mempergunakan keyakinannya secara tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Volume 47, Nomor 1, 2018. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21>
- Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 201. <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>.
- Laurensius Arliman S, Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa, Padjadjaran Journal of Law, Volume 4, Nomor 3, 2017. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3433>.
- Laurensius Arliman S, Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Supremasi Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2018. <http://dx.doi.org/10.36441/hukum.v1i01.102>.
- Laurensius Arliman S, Memperkuat Kearifan Lokal Untuk Menangkal Intoleransi Umat Beragama Di Indonesia, Ensiklopedia of Journal, Volume 1, Nomor 1, 2018, <https://doi.org/10.33559/eoj.v1i1.18>.
- Laurensius Arliman S, Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional, Kertha Patrika, Volume 39, Nomor 3, 2017, <https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i03.p03>.
- Laurensius Arliman S, Partisipasi Masyarakat Di Dalam Pengelolaan Uang Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jurnal Arena Hukum, Volume 12, Nomor 2, 2019, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.5>.
- Laurensius Arliman S, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia, Dialogica Jurnalica, Volume 11, Nomor 1, 2019, <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>.
- Laurensius Arliman S, Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional, UIR Law

Review, Volume 2, Nomor 2, 2018,
[https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2\(02\).1587](https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2(02).1587)

Laurensius Arliman S, Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia, Doctrinal, Volume 1, Nomor 2, 2016.

Laurensius Arliman S, Ni Putu Eka Dewi, *Protection of Children and Women's Rights in Indonesia through International Regulation Ratification*, Journal of Innovation, Creativity and Change Volume 15, Nomor 6, 2021.

Laurensius Arliman S, *Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme*, Jurnal Yuridis, Volume 3, Nomor 2, 2016, <http://dx.doi.org/10.35586/v3i2.180>.

Laurensius Arliman S, Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0, Jurnal Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020..